

KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP USAHA PEMBESARAN IKAN NILA PETANI PEMODAL BESAR DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Verry Yorda Ningsih

Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Musi Rawas
Jl. Pembangunan Kompleks Perkantoran PEMKAB MURA Kelurahan Air Kuti 1 Lubuklinggau
e-mail: verriyn.unmura@gmail.com

ABSTRACT

Musi Rawas Regency is one of the Minneapolitan regions in South Sumatra Province. This research was conducted there purposed to identify comparative excellence and the effect of government policies toward *output* and *input* of tilapia enlargement for big financier farmer in Musi Rawas. The method used in the research is survey. The sampling method was carried out by using simple random sampling method with the number of respondents were 12 big financier farmers of the tilapia enlargement affair. The results of this study showed that the tilapia enlargement affair in Musi Rawas had a high comparative excellence indicated by a DRCR value <1 of 0.54. Whereas the government's policy towards *input* of tradable production facilities that in the form of subvention had a positive effect to big financier farmers of the tilapia enlargement affair in Musi Rawas Regency.

Keywords: *Big Financier Farmer, Comparative Excellence, Impact of Government Policy*

ABSTRAK

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kawasan minapolitan di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif dan dampak kebijakan pemerintah terhadap *output* dan *input* pembesaran ikan nila bagi petani pemodal besar di Kabupaten Musi Rawas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survey. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 12 orang petani pemodal besar pada usaha pembesaran ikan nila. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas pada pemodal besar memiliki keunggulan komparatif yang tinggi ditandai dengan nilai DRCR < 1 sebesar 0,54. Sedangkan kebijakan pemerintah terhadap *input* sarana produksi *tradable* berupa subsidi berpengaruh positif bagi petani pemodal besar pada usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas.

Keywords: *Petani Pemodal Besar, Komparatif, Dampak Kebijakan Pemerintah*

PENDAHULUAN

Trend permintaan ikan di dunia terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi dunia terhadap ikan yang diperkirakan akan mencapai 19,6 kg perkapita pada Tahun 2021. Meningkatnya jumlah permintaan ikan ini disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan tentang kandungan nutrisi ikan yang merupakan sumber protein

dan mikronutrien penting bagi kesehatan. Kenaikan tingkat kebutuhan konsumsi ikan di dunia inilah yang menyebabkan kenaikan permintaan terhadap ikan (Ditjen Perikanan Budidaya, 2013)

Volume ekspor untuk hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,02% pada tahun 2012, dari 1.159 juta ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 1.229 juta ton, sedangkan berdasarkan nilai

dibandingkan tahun 2011, total nilai ekspor ditandai dengan kenaikan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2012 sebesar 9,44% dari US\$ 3,52 milyar ditahun 2011 menjadi 3,85 Milyar ditahun 2012 (BPS, 2012)

Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Minapolitan juga merupakan konsep pengembangan kawasan perikanan yang sedang digalakkan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Musi Rawas. Kawasan minapolitan Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 3 wilayah yakni Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Muara Beliti. Ikan Nila pada kawasan Minapolitan di Kabupaten Musi Rawas mendapatkan posisi yang baik, hal ini ditunjukkan dari data produksi tertinggi sejak tahun 2010-2014, dan ikan nila menunjukkan *trend* pertumbuhan yang positif.

Produksi ikan nila Kawasan Minapolitan dipasarkan di Kabupaten Musi Rawas dan sekitarnya selain itu juga ikan nila ini dipasarkan di luar Kabupaten Musi Rawas yaitu daerah Bengkulu, Jambi, Pekan baru dan Palembang artinya usaha pembesaran ikan nila yang ada di kabupaten Musi Rawas juga memenuhi kebutuhan pasar diluar provinsi sehingga usaha pembesaran ikan nila pada pemodal besar ini memiliki prospek serta kemampuan untuk bersaing dan memanfaatkan peluang pasar internasional. Salah satu kebijakan yang telah dijalankan pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap Kawasan Minapolitan khususnya untuk pembesaran ikan nila adalah memberikan bantuan-bantuan stimulan sarana produksi maupun pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada petani tentang budidaya ikan air tawar. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi keunggulan komparatif dan dampak kebijakan pemerintah terhadap *input* dan *output* terhadap usaha pembesaran ikan nila petani pemodal besar di Kabupaten Musi Rawas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi langsung dari sekelompok individu atau sampel dan sampel ini merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja di Kabupaten Musi Rawas dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kawasan minapolitan yang ada di Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data di tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah pembudidaya ikan nila dan pengusaha ikan nila yang berada di kawasan minapolitan yang terdiri dari 3 Kecamatan Yakni Kecamatan Tugumulyo memiliki 17 desa, Kecamatan Purwodadi memiliki 11 Desa dan Kecamatan Muara Beliti memiliki 11 desa. Metode penentuan responden adalah dengan metode *Purposive* yaitu sengaja dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti yakni:

- Kriteria responden untuk pembudidaya pemodal besar adalah sebagai berikut:
- Pengusaha memiliki kolam air deras dan semi deras
 - Memiliki luas lahan kolam permanen (dinding beton) sebesar 4 x 12 m2 dengan kedalaman 2-3 meter;
 - Kapasitas ikan per kolam 2 ton (2.000 kg)
 - Ukuran ikan yang dimasukan ke kolam air deras 15 ekor / kg
 - Pemodal besar bukan merupakan anggota kelompok yang mendapatkan bantuan dari pemerintah
 - Lama pembesaran ikan 3 bulan
 - Produksi ikan 2-3 ekor/kg.

Jumlah Petani pemodal besar yang ada sesuai dengan kriteria responden di Kecamatan Tugumulyo sebanyak 24 orang dan 14 orang untuk Kecamatan Muara Beliti, sehingga jumlah pengusaha pada kawasan minapolitan yang sesuai dengan kriteria responden sebanyak 38 orang.

Cara menentukan jumlah responden yakni dengan cara *purposive* dengan pertimbangan bahwa populasi petani ikan sudah homogen dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, menurut Daryono (2008) paling sedikit 10 % dalam menentukan jumlah responden. Pada penelitian ini digunakan sebanyak 30% dari jumlah populasi yakni $30\% \times 38 \text{ orang} = 12 \text{ orang}$.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada sejumlah petani, pengusaha dan informan yang terlibat langsung dalam kegiatan usahatani ikan nila dan dengan menggunakan kuisioner yang terstruktur. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literature, dokumen hasil penelitian pada instansi perikanan, BPS, dan stakeholder lainnya yang berupa hasil-hasil penelitian sejenis baik komoditas ataupun alat analisis, data luas lahan kolam ikan serta produksi ikan, dan profil wilayah kabupaten Musi Rawas.

Asumsi untuk *input tradable* dan *non tradable* dari usaha pembesaran ikan nila pada pemodal besar di Kabupaten Musi Rawas adalah (1) **Pupuk**. Pupuk kandang dan kapur yang digunakan dalam usaha pembesaran ikan nila di daerah penelitian ini merupakan *input non tradable* sedangkan pupuk urea dan TSP merupakan *input tradable*. Pengalokasian biaya *input* produksi pupuk urea dan TSP didasarkan perhitungan hutabarat, *et al* dalam sadikin 1999 yakni untuk pupuk urea masing-masing 75,02% komponen domestik, 23,60% komponen asing dan 1,38% pajak, sedangkan pupuk TSP masing-masing 14,62% komponen domestik, 84% komponen asing dan 1,38% pajak. Menurut Azhari 1996 Indonesia merupakan negara produsen urea dengan biaya yang cukup rendah, berbeda dengan pupuk lain, Indonesia merupakan net importer, sebab sebagian besar bahan bakunya (84%) untuk memproduksi jenis pupuk tersebut masih harus diimpor. (2) **Obat-obatan**. Obat-obatan yang digunakan dalam usaha

pembesaran ikan nila di daerah penelitian ini adalah pastax, vitamin C, dan tetra yang merupakan *input tradable*, untuk pengalokasian biaya obat-obatan didasarkan pada perhitungan hutabarat, *et al* dalam sadikin 1999 yakni dengan masing-masing komponen 75,02% komponen domestik, 23,60% komponen asing dan 1,38% pajak. (3) **Peralatan**. Peralatan yang digunakan dalam usaha pembesaran ikan nila di daerah penelitian ini adalah Angkong, Garu, Sekop, Cangkul, Paralon alat-alat yang dipakai dalam usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas adalah produksi lokal (dalam negeri) dan digolongkan ke dalam *input non tradable*, akan tetapi mengingat sebagian komponennya terdapat komponen barang *tradable* kecuali Waring, Keranjang dan empang, maka pada penelitian ini pengalokasian besarnya penyusutan peralatan pertanian tersebut akan dipakai konversi hasil perhitungan hutabarat *et al* dalam sadikin 1999 yakni 33,50% merupakan komponen domestik, 64,80% komponen asing dan 1,70% pajak. (5) **Pakan ikan**. Pakan ikan yang digunakan merupakan *input tradable* karena meskipun di produksi dalam negeri tetapi sebagian komponen bahan baku pembuatan pakan ikan berasal dari impor. Adapun komposisi pakan ternak menurut pernyataan menteri perikanan dan kelautan bahwa 99% pakan ikan merupakan komponen impor. (6) **Bibit Ikan Nila**. Bibit ikan nila yang digunakan adalah bibit ikan hasil pembenihan sendiri dan membeli dari petani pemodal kecil. Bibit ikan nila yang digunakan oleh petani pemodal besar juga digolongkan kepada *input non tradable* karena bibit ikan yang diperoleh dari pemodal besar merupakan hasil pemenuhan kebutuhan *input* domestik atau dapat dipenuhi oleh daerah penelitian yakni Kabupaten Musi Rawas. (7) **Tenaga Kerja**. Upah tenaga kerja dalam penelitian ini dihitung sama dengan tingkat upah tenaga kerja harian lepas yang berlaku (*existing*) dilokasi usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas, begitupun dengan harga sosialnya karena pemenuhan kebutuhan *input* produksi

ikan nila tersebut lebih ditentukan oleh pasar domestik. Tenaga kerja dalam penelitian ini digolongkan kepada *input non tradable* karena kebutuhan akan tenaga kerja lebih ditentukan oleh pasar domestik. **(8)Biaya Sewa.** Biaya sewa lahan yang digunakan pada usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas adalah biaya sewa kolam air deras. Biaya sewa lahan digolongkan kepada *input non tradable*. Berdasarkan pernyataan gittinger (1986) yang menyebutkan bahwa penentuann harga bayangan faktor produksi tanah adalah sama sesuai dengan nilai sewanya.

Penelitian ini dianalisis menggunakan Analisis PAM (*Policy Anlayisis Matrix*) yang telah dikembangkan oleh Monke dan Person sejak tahun 1987. Analisis ini dapat digunakan pada sistem komoditas dengan berbagai wilayah, tipe usahatani, dan teknologi. Selain itu analisis PAM juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat memperbaiki daya saing terhadap perusahaan suatu komoditi yang dihasilkan dari penciptaan efisiensi usaha dan pertumbuhan pendapatan (Ningsih VY *et al.*, 2016)

Keunggulan Komparatif DR **Domestic Resources Cost Ratio** **(DRCR) = $G / (E - F)$**

Jika DRCR < 1, maka sistem komoditas mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya jika DRCR ≥ 1 sistem komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif.

Dampak Kebijakan Pemerintah

1. Kebijakan Terhadap Output

a. Output Transfer (OT) : $I = A - E$

Jika nilai OT > 0 menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) kepada produsen, sebaliknya bila OT ≤ 0, menunjukkan tidak ada transfer dari masyarakat (konsumen) kepada produsen.

b. Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) = A / E

jika nilai NPCO > 1. Semakin besar nilai NPCO, berarti semakin banyak proteksi pemerintah terhadap *output*, sebaliknya bila NPCO < 1, kebijakan bersifat disincentif.

2. Kebijakan Terhadap Input

a. Input Transfer (IT) : $J = B - F$

Jika nilai IT > 0, menunjukkan adanya transfer dari produsen kepada *input tradable*, sebaliknya bila IT ≤ 0, menunjukkan produsen *input tradable*

b. Nominal Protection Coefficient on Tradable Input

NPCI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap *input* domestik. Jika nilai NPCI < 1, berarti kebijakan subsidi terhadap *input tradable*, sebaliknya bila NPCI > 1, kebijakan bersifat protektif terhadap *input*/ tidak ada kebijakan subsidi terhadap *input tradable*.

c. Transfer Factor b. Transfer Factor (TF) : $K = C - D$

Transfer faktor merupakan nilai yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap *input* sosialnya yang diterima produsen untuk pembayaran faktor produksi diperdagangkan (*non tradable*). Nilai TF > 0 berarti bahwa pemerintah memberikan proteksi terhadap produsen *input non tradable* atau pemerintah, sebaliknya bila TF < 0, pemerintah memberikan proteksi kepada produsen *input non tradable*

3. Kebijakan Terhadap Input-Output

a. Effective Protection Coefficient (EPC) = $(A - B) / (E - F)$
EPC merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap *input tradable*. Kebijakan masih bersifat protektif, jika nilai EPC > 1, semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditas tersebut.

b. Net Transfer (NT): $L = D - H$

Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan bersih produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai NT > 0, menunjukkan bahwa pemerintah memberikan proteksi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan terhadap *input tradable* juga sebaliknya.

c. Profitability Coefficient (PC) = D / H

Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika PC > 0, pemerintah memberikan insentif kepada konsumen, demikian sebaliknya.

d. Subsidy Ratio to Producer (SRP) = L / E

Rasio subsidi produsen (SRP) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap *input tradable* pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau insentif diberikan kepada produsen. Nilai SRP yang negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi (*opportunity cost*) untuk berproduksi dan sebaliknya jika nilai SRP > 0, pemerintah memberikan insentif kepada produsen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keunggulan Komparatif Usaha Pembesaran Ikan Nila

Keunggulan komparatif (*comperative advantage*) menurut David Ricardo merupakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Setiap negara akan memperoleh keuntungan jika ada spesialisasi pada produksi dan ekspor barang dan jasa yang dapat diproduksinya pada biaya yang lebih murah daripada negara lain. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Setiap negara akan memperoleh keuntungan jika ada spesialisasi pada produksi dan ekspor barang dan jasa yang dapat diproduksinya pada biaya yang lebih murah daripada negara lain.

yang relatif lebih mahal (Oktaviani, R dan Novianti, T, 2009)

Keunggulan komparatif suatu komoditas ditentukan oleh nilai-nilai keuntungan sosial (*SP/Social Profitability*) dan nilai ratio sumber daya domestik (*DRCR/Domestic Resource Cost Ratio*) (Tabel 1).

Hasil analisis dari Tabel 1 dengan metode PAM menunjukkan bahwa nilai keuntungan sosial/SP untuk usaha pembesaran ikan nila pada pemodal besar di Kabupaten Musi Rawas adalah Rp. 48.107.970 ini menunjukkan bahwa usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas layak diusahakan dan memiliki keuntungan komparatif. Keuntungan sosial adalah keuntungan yang diperoleh jika terjadi pasar persaingan sempurna, dimana tidak ada campur tangan pemerintah dan kegagalan pasar.

Nilai ratio sumber daya domestik/DRCR usaha pembesaran ikan nila pada pemodal besar di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil analisis adalah 0,54 nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah diperlukan biaya domestik sebesar 0.54 unit pada usaha pembesaran ikan nila pada pemodal besar di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani S, et al yang menyatakan bahwa nilai DRC kurang dari satu ($DRC < 1$) menunjukan bahwa sistem usaha tani efisien secara ekonomi dan mempunyai keunggulan komparatif serta mampu beroperasi tanpa intervensi dari pemerintah. Nilai

DRC untuk usaha budidaya ikan patin dengan pakan alternative sebesar 0,47. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada usaha budidaya ikan patin dengan pakan alternatif untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah *output* dibutuhkan 0,47 satuan biaya domestik (Handayani S, et al 2013)

Dampak Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ekspor ataupun sebagai usaha dalam melindungi produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan untuk *input* dan *output* yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga *input* dan harga *output* yang diminta produsen (harga privat) dengan harga yang sebenarnya terjadi jika dalam kondisi perdagangan bebas (harga sosial). Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada suatu komoditas ada dua bentuk yaitu subsidi dan hambatan perdagangan. Kebijakan subsidi terdiri dari subsidi positif dan subsidi negatif (pajak), sedangkan hambatan perdagangan berupa tarif dan kuota (Rahmi, PP. 2017)

Setiap negara berkembang memiliki kebijakan pemerintah pada sektor pertanian sehingga dapat menentukan keberhasilan pengembangan dan usaha dalam rangka menambah devisa negara. Suatu kebijakan pemerintah dalam suatu aktivitas ekonomi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelaku ekonomi.

Tabel 1. Analisis Keunggulan Komparatif Matriks PAM

Uraian	Simbol	Hasil	Kesimpulan
Keunggulan Komparatif pada pemodal besar			
<i>Social Profitability</i>	SP	48.107.970	$SP > 0$, ada efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi tidak divergensi dan penerapan kebijakan efisiensi.
<i>Domestic Resources Cost Ratio</i>	DRCR	0.54	$DRCR < 1$, Komoditas yang diteliti memiliki keunggulan yang komparatif.

Sumber Data: Data diolah, 2015

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Kebijakan pemerintah berupa subsidi dan pajak pada suatu komoditas agribisnis dapat berpengaruh positif dan negatif bagi para pelakunya. Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat dilihat dengan menggunakan nilai OT (*Output Transfer*) dan NPCO (*Nominal Protection Coefficient On Output*) (Tabel 2).

Hasil analisis dari Tabel 2 metode PAM diketahui bahwa nilai OT pada usaha pembesaran ikan nila adalah negatif artinya harga privat pada pemodal besar dan pemodal besar lebih rendah daripada harga sosialnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya intervensi pemerintah pada output terhadap usaha pembesaran ikan nila ini lebih menguntungkan konsumen, karena konsumen membeli harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya. Dengan kata lain, terjadi pengalihan surplus dari produsen ke konsumen.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap input

Kebijakan pemerintah tidak saja berlaku untuk *output* namun berlaku pula untuk harga *input*. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk melihat intervensi pemerintah terhadap *input* produksi adalah nilai transfer (IT), Transfer Faktor (TF), dan koefisien proteksi nominal pada *input/Nominal Protection Coefisien on Tradable Input* (Tabel 3).

Hasil analisis dari Tabel 3 dengan menggunakan metode PAM diketahui bahwa nilai IT adalah negatif. Nilai IT menggambarkan kebijakan subsidi atau pajak yang terjadi pada *input* tradable. Nilai negatif untuk usaha pembesaran ikan nila menunjukkan bahwa terdapat kebijakan subsidi terhadap *input* produksi tradable dalam usaha pembesaran ikan nila. Hal tersebut menguntungkan bagi petani budidaya ikan nila karena terdapat kebijakan pemerintah berupa subsidi atas *input* tradable yang menyebabkan harga yang dibayarkan petani terhadap *input* tersebut lebih rendah dari harga sebenarnya.

Tabel 2. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Uraian	Simbol	Hasil	Kseimpulan
Kebijakan Ouput Petani Pemodal besar			
<i>Output Transfer</i>	OT	(11.531.520)	Tidak adanya transfer dari masyarakat (Konsumen) ke Produsen
<i>Nominal Protection Coefficient Output</i>	NPCO	0.94	Kebijakan bersifat disensitif

Sumber Data: Data Diolah, 2015

Tabel 3 Dampak kebijakan Pemerintah terhadap Input

Uraian	Simbol	Hasil	Kesimpulan
Kebijakan Input Pada Pemodal besar			
<i>Input Transfer</i>	IT	(29.701)	Menunjukkan adanya subsidi pemerintah terhadap <i>input</i> asing.
<i>Transfer Factor</i>	TF	0	Adanya subsidi positif pada <i>input non tradable</i>
<i>Nominal Protection Coefficien on Tradable Input</i>	NPCI	1	Tidak ada kebijakan protektif terhadap <i>input tradable</i>

Sumber data: data diolah, 2015

Nilai IT adalah negatif Rp. 29.701. Nilai negatif untuk usaha pembesaran ikan nila menunjukkan bahwa terdapat kebijakan subsidi terhadap *input* produksi *tradable* dalam usaha pembesaran ikan nila. Hal tersebut menguntungkan bagi petani pemodal besar usaha pembesaran ikan nila karena terdapat kebijakan pemerintah berupa subsidi atas *input tradable* yang menyebabkan harga yang dibayarkan petani terhadap *input* tersebut lebih rendah dari harga sebenarnya walaupun hanya sebesar Rp 29.701.

Kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini menguntungkan petani karena berarti biaya produksi yang mesti dikeluarkan petani dalam usahatani mereka menjadi berkurang, berkurangnya biaya produksi usahatani ini menyebabkan selisih keuntungan privat yang diterima juga semakin besar. Selain menggunakan *input tradable* produsen ikan nila juga menggunakan *input non tradable*. Nilai TF mampu menggambarkan intervensi pemerintah terhadap *input non tradable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $TF = 0$ artinya $TF \leq 0$ berarti tidak ada transfer dari petani kepada produsen *input non tradable*. Nilai NPCI adalah ratio antara biaya *input tradable* berdasarkan harga privat dan biaya *input tradable* pada harga sosial. NPCI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga *input* domestik. Hasil analisis menunjukkan

nilai NPCI sebesar 1 artinya tidak ada kebijakan untuk *input tradable*.

Dampak Kebijakan terhadap *input* dan *output* Usaha Pembesaran Ikan Nila

Analisis kebijakan pemerintah terhadap *input-output* merupakan gabungan kebijakan *input* dan kebijakan *output*. Dampak Kebijakan secara keseluruhan baik terhadap *input* maupun *output* dapat dilihat dari koefisien proteksi efektif (EPC), transfer bersih (NT), koefisien keuntungan (PC), dan rasio subsidi bagi produsen (SRP) (Tabel 4).

Nilai EPC berdasarkan Tabel 4 menggambarkan sejauh mana kebijakan pemerintah dalam melindungi produksi domestik secara efektif. Jika nilai EPC kurang dari satu, maka kebijakan tersebut berjalan efektif. Pada usaha pembesaran ikan nila nilai EPC sebesar 0,89 artinya penerapan kebijakan pemerintah terhadap *input-output* usaha pembesaran ikan nila efektif.

Salah satu indikator yang mampu menjelaskan pengaruh dampak kebijakan terhadap surplus produsen adalah nilai transfer bersih (NT). Nilai Transfer bersih merupakan selisih dari nilai keuntungan privat dengan nilai keuntungan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai NT sebesar (Rp. 11.501.819), artinya usaha pembesaran ikan nila belum mampu menciptakan surplus produsen.

Tabel 4. Matriks dampak kebijakan *input-output*

Uraian	Simbol	Hasil	Kesimpulan
Kebijakan <i>Input</i> Pada Pemodal Besar			
Koefisien proteksi	EPC	0,89	$EPC \leq 1$, kebijakan tidak bersifat protektif, tidak ada proteksi pemerintah terhadap komoditas domestik
Efektif Bersih	Transfer NT	(11.501.819)	$NT \leq 0$ menunjukkan tidak ada tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada <i>input</i> dan <i>output</i> surplus produsen.
Koefisien keuntungan	PC	0,7609	$PC > 0$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah insentif kepada produsen
Rasio Subsidi	SRP	-0,0609	$SRP < 0$ artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan untuk berproduksi

Koefisien keuntungan (PC) merupakan rasio antara keuntungan bersih aktual dengan keuntungan bersih ekonomi. Nilai PC menunjukkan pengaruh gabungan pada *output*, *input* tradable dan *input* non tradable. Rasio PC ini digunakan untuk melihat dampak kebijakan yang menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan privat (finansial) dan keuntungan ekonomi (sosial). Nilai PC juga menunjukkan pengaruh keseluruhan dari kebijakan yang menyebabkan keuntungan privat berbeda dengan keuntungan ekonomi.

Nilai PC pada petani pemodal besar yang diperoleh dari analisis adalah 0,7609 ini berarti keuntungan produsen bila ada pengaruh intervensi dari pemerintah sebesar 0,7609 kali dari keuntungan sosial. Produsen hanya menerima keuntungan 76,09% dari keuntungan yang akan diterima oleh produsen bila pemerintah tidak ikut campur tanagn atau dengan katalain nilai PC kurang dari satu berarti kebijakan pemerintah mengakibatkan keuntungan yang diterima produsen lebih rendah jika di bandingkan tanpa adanya kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan pemerintah telah memberikan insentif kepada produsen

Indikator dampak kebijakan terhadap *input* – *output* selanjutnya adalah SRP atau Rasio subsidi bagi produsen. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai SRP sebesar -0,0609 secara umum kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan usaha pembesaran ikan nila mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar yakni 6,09% dari biaya imbalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas pada pemodal besar memiliki keunggulan komparatif yang ditandai dengan nilai DRCC < 1 sebesar 0,54
2. Adanya kebijakan pemerintah terhadap *input* sarana produksi

tradable berupa subsidi yang memberikan manfaat pada petani usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas

Saran

1. Bagi pemerintah : Perlu adanya kebijakan *input*-otput agar dapat melindungi petani usaha pembesaran ikan nila sehingga petani dapat menerima harga privat yang baik dalam meningkatkan penerimaan.
2. Bagi Petani : untuk melakukan peningkatan produksi bagi pemodal besar dalam usaha pembesaran ikan nila di Kabupaten Musi Rawas karena usaha pembesaran ikan nila memiliki tingkat keunggulan baik secara komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS 2012. *Statistik Eksport Hasil Perikanan Menurut Komoditi Provinsi dan Pelabuhan Asal Ekport*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- BPS 2013. *Laporan Produksi Perikanan Budidaya*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Dinas Peternakan dan Perikanan. 2015. *Laporan Tahunan*. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
- Ditjen Perikanan Budidaya. 2013. *Laporan Produksi Perikanan Budidaya*. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jakarta.
- Handayani S. et al, 2013. *Daya Saing Usaha Budidaya Ikan Patin di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol 10 No 3, November 2013. Bogor.
- Monke, E. A. And E. S. Pearson dalam Ningsih VY, et.al, 2016. *Analisis Daya Saing Usaha Pembesaran Ikan Nila Petani Pemodal Kecil di Kabupaten Musi Rawas*. Jurnal Agrisev Vol 15 No 2, September 2016. Bengkulu

- Oktaviani, R dan Novianti T, 2009. *Teori Perdagangan International dan Aplikasinya di Indonesia*. Bogor : Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB. Bogor
- Rahmi Palupi P, 2017. *Analisis Daya saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Teh*. Jurnal Indonesia Membangun. Bandung.
- Riduan dan Sunarto.2009. *Pengantar Statistika untuk penelitian pendidikan, sosial ekonomi, komunikasi dan bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sadikin I. 1999. *Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Pemerintah pada Pengembangan Produksi Jagung di Bengkulu*. Puslitang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor